

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya bisnis dalam bentuk perdagangan saham di pasar modal menjadikan informasi tentang kondisi perusahaan *public* (emiten) berharga bagi para investor maupun calon investor. Kehadiran bursa efek sebagai lembaga penunjang pasar modal telah ikut berperan serta dalam menunjang perkembangan perusahaan-perusahaan yang ada dalam satu negara. Setiap informasi yang relevan tentang emiten, dengan cepat diserap oleh pasar dan dengan cepat pula pasar mengekspresikannya dalam bentuk harga atau perubahan harga saham.

Informasi tentang perusahaan *public* (emiten) berharga bagi para investor salah satunya adalah informasi tentang struktur modal dan nilai perusahaan dalam suatu periode atau waktu tertentu yang merupakan bentuk informasi fundamental. Para investor menggunakan informasi tersebut sebagai dasar penilaian harga (*return*) saham, keputusan membeli atau menjual saham (Handayani, 2008:11).

Melalui bursa efek memungkinkan suatu perusahaan untuk menerbitkan sekuritas yang berupa saham. Setiap perusahaan yang menerbitkan saham secara umum bertujuan untuk meningkatkan harga atau nilai sahamnya guna memaksimalkan kekayaan atau kemakmuran para pemegang sahamnya. Selain itu

juga merupakan salah satu sumber pendanaan bagi perusahaan yang merupakan salah satu dari struktur modal yang terdapat di dalam perusahaan.

Kebijakan struktur modal merupakan kebijakan tentang bauran dari segenap sumber pendanaan jangka panjang yang digunakan perusahaan. Memahami dasar-dasar teori struktur modal sangatlah penting, karena pemilihan bauran dana (*financing mix*) merupakan inti strategis bisnis secara keseluruhan. Kebijakan struktur modal akan berpengaruh positif terhadap nilai saham melalui penciptaan bauran atau kombinasi sumber dana (hutang jangka panjang dan modal sendiri) sehingga mampu memaksimalkan nilai saham.

Dalam kondisi tertentu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan mengutamakan sumber-sumber dari dalam perusahaan, akan tetapi ada kalanya juga dana sudah sedemikian meningkat karena pertumbuhan perusahaan, dan dana internal telah di gunakan semua, maka tidak ada pilihan lain selain menggunakan dana yang berasal dari luar perusahaan yang berupa hutang (*debt*). Penggunaan hutang dalam suatu perusahaan akan menaikkan nilai saham, karena adanya kenaikan pajak yang merupakan pos deduksi terhadap biaya hutang, namun pada titik tertentu penggunaan hutang dapat menurunkan nilai saham karena adanya pengaruh biaya kepailitan dan biaya bunga yang di timbulkan dari adanya penggunaan hutang.

Kebijakan deviden merupakan kebijakan tentang berapa banyak bagian keuntungan yang dibagikan sebagai deviden. Keputusan untuk menentukan berapa banyak deviden yang harus di bagikan kepada pemegang saham, khususnya pada

perusahaan yang *go public*, akan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yang tercermin dari harga saham. Jika perusahaan memiliki laba setiap tahunnya, maka perusahaan tersebut akan berfikir apakah dari laba yang di perolehnya tersebut akan di berikan semua atau sebagian atau seluruhnya di tahan untuk di investasikan kembali.

Persoalan ini sebenarnya bukan persoalan biasa, karena akan mempunyai implikasi pada naik turunnya harga saham perusahaan. Karena berkaitan dengan itulah di perlukan adanya pengaturan yang matang tentang bagaimana penentuan laba yang di peroleh di alokasikan pada deviden dan laba yang harus dibayar. Kebijakan deviden akan berpengaruh positif terhadap nilai saham, melalui penciptaan keseimbangan di antara deviden saat ini dan laba di tahan sehingga mampu memaksimalkan nilai saham. Jika perusahaan bersangkutan menjalankan kebijakan untuk membagikan tambahan tunai maka akan cenderung meningkatkan harga saham, namun jika nilai deviden tunai meningkat maka makin sedikit dana yang tersedia untuk reinvestasi sehingga tingkat pertumbuhan perusahaan yang di harapkan untuk masa mendatang akan rendah, dan hal ini akan menurunkan harga saham.

Untuk itu keputusan struktur modal dan kebijakan deviden harus selalu di evaluasi atas dasar akibatnya terhadap nilai atau harga sahamnya. Meskipun harga atau nilai yang terjadi di pasar pada saat keputusan struktur modal dan kebijakan deviden di umumkan, bukan merupakan satu-satunya pedoman yang digunakan untuk pengambilan keputusan, namun demikian setiap perusahaan harus

menyadari bahwa nilai atau harga saham yang terjadi di pasar merupakan pedoman yang penting untuk mengevaluasi keputusan perusahaan, yaitu untuk mengevaluasi apakah kebijakan struktur modal dan kebijakan deviden dapat memaksimalkan harga sahamnya.

Terkait investasi dengan pengaruhnya terhadap struktur modal, ini mengharuskan perusahaan untuk memiliki kebijakan dalam melakukan pembayaran deviden. Menurut Eduardus (2001) salah satu *return* yang dapat diperoleh investor adalah deviden, deviden merupakan hak pemegang saham terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atas kegiatan bisnisnya. Jadi, kebijakan deviden adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa mendatang (Agus, 2001). Para pemegang saham memandang negatif terhadap perusahaan yang mengurangi deviden, karena mengurangi deviden dapat mereka kaitkan pada kesulitan keuangan pada suatu perusahaan yang tentu saja berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penurunan pembayaran deviden akan dilihat sebagai prospek perusahaan yang buruk, begitu juga sebaliknya.

Perusahaan yang berhasil mendapatkan laba akan membagikan deviden kepada pemegang sahamnya, dimana dalam kebijakan pembayaran deviden ditentukan berapa jumlah akan dikeluarkan dan dibayarkan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Brigham, 2006), kebijakan deviden perusahaan tercermin dalam rasio pembayaran deviden

(*Devidend Payout Ratio*), dimana kebijakan deviden oleh perusahaan merupakan tingkat pengembalian investasi pada sisi investor.

Selain pembayaran deviden, pembayaran hutang atas perusahaan juga mempengaruhi nilai perusahaan didepan mata investor. Hal ini terkait terhadap laba perusahaan yang akan digunakan sebagai pembayaran kewajiban/utang dan pembayaran deviden. Menurut Eduardus (2001) Perusahaan dengan struktur modal yang dipenuhi oleh utang akan cenderung dijauhi oleh para investor karena tingginya utang merupakan suatu beban yang akan ditanggung dari investasi dan juga perusahaan dengan utang yang tinggi memiliki risiko likuidasi yang tinggi karena ketidakmampuan dalam melunasi semua kewajibannya. Dengan kondisi tersebut, investor akan bereaksi negatif terhadap tingkat hutang dan tentunya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain, tingginya struktur modal diindikasikan dapat menurunkan nilai perusahaan.

Hutang secara Manajemen Keuangan adalah bertujuan untuk me *leverage* atau mendongkrak kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan hanya mengandalkan modal atau ekuitasnya saja, tentunya perusahaan akan sulit melakukan ekspansi bisnis yang membutuhkan modal tambahan. Disinilah peranan hutang sangat membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi tersebut. Namun jika jumlah hutang sudah melebihi jumlah ekuitas yang dimiliki maka resiko perusahaan dari sisi likuiditas keuangan juga semakin tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah rasio khusus untuk melihat

kinerja tersebut. *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka *Debt to Equity Ratio* (DER) maka diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. *Debt to Equity Ratio* (DER) ini mengindikasikan:

1. Semakin besar jumlah aset yang dibiayai oleh hutang.
2. Semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh modal.
3. Semakin tinggi resiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang.
4. Semakin tinggi beban bunga hutang yang harus ditanggung perusahaan

Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar pula tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar pula beban biaya hutang yang harus dibayar perusahaan. Semakin meningkat rasio maka hal tersebut berdampak pada menurunnya profit yang diperoleh perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman (Hardinugroho, 2012).

Kesimpulan yang dapat dilihat dr penjelasan ini, bahwa hutang dan deviden berkaitan dan saling mempengaruhi. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham termasuk deviden yang akan diterima, karena kewajiban

tersebut lebih tinggi, maka kemampuan perusahaan untuk membagi deviden akan semakin rendah.

Melihat signifikan atau tidaknya *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) menggunakan uji statistic dengan uji parsial dengan menggunakan nilai *Debt to Equity Ratio* (DER) dari suatu perusahaan dan nilai *Dividend Payout Ratio* (DPR) dan menggunakan SPSS dalam pengolahannya, mendapatkan hasil bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh signifikan terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) (Danica:2008). Sehingga DER memiliki pengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Berbicara tentang hutang dan deviden, salah satu faktor besar yang mempengaruhi itu semua adalah pajak. Besar kecilnya laba perusahaan dan kaitannya terhadap pembayaran hutang dan deviden tentu sangat mempengaruhi besar atau kecilnya pajak yang akan dibayarkan atas pendapatan perusahaan tersebut. Walaupun pajak bukanlah faktor utama yang diperhatikan untuk keputusan pendanaan dalam suatu perusahaan, tetapi pada dasarnya pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh siapapun termasuk pada perusahaan. Hal ini terjadi karena keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan pajak, deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham diambil dari keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan, semakin besar keuntungan

yang diperoleh, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar deviden.

Tarif pajak Penghasilan (*Corporate Tax Rate*) di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah tarif pajak progresif yaitu tarif yang dikenakan secara berjenjang terhadap penghasilan kena pajak, semakin besar laba perusahaan semakin tinggi pajak yang harus dibayarnya. Apabila perusahaan telah dikenakan tarif marginal tersebut maka perusahaan cenderung untuk melakukan efisiensi perhitungan pajak yang akan dibayar dengan jalan menambah biaya semaksimal mungkin yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak (*tax deductible*)

Pendekatan yang dipakai Weston & Copeland, (1995) untuk menentukan apakah memakai utang atau menambah modal pemilik adalah perbandingan nilai perusahaan. Selisih kelebihan nilai tersebut bila dibandingkan dengan penambahan modal pemilik terletak pada beban pajak penghasilan yang lebih kecil akibat bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya.

Menurut Choi (2003) bahwa perusahaan dengan tarif pajak marjinal yang tinggi memiliki insentif lebih banyak untuk mengajukan utang karena dapat mengambil keuntungan dari pengurangan bunga. Sesuai dengan Undang-undang PPh bunga pinjaman adalah beban yang dapat dikurangkan

untuk tujuan perpajakan (*tax deductible*), dan pengurangan tersebut sangat bernilai/berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi (*marginal*).

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, dkk, 2004).

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efeknya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Penelitian mengenai struktur modal dengan kaitannya terhadap pajak sebelumnya telah dilakukan oleh Yulianti tahun 2008 pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitiannya, Yulianti menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Debt to Asset Ratio* (DAR) sebagai variabel independen dan PPh Badan terutang sebagai variabel dependennya.

Selanjutnya penelitian yang relevan dengan peneliti yaitu pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang PT. Wiharta Pramental Gresik yang dilakukan oleh Erna Dewi Sofiani tahun 2014. Dalam penelitiannya ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut kurang efektif dalam memilih pendanaan. Sebagian besar assetnya di beli dengan hutang sehingga perputaran modal kurang efektif bagi perusahaan. Dalam penelitiannya, Erna menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) *Debt to Equity Ratio* (DER) dan sebagai variabel independen dan PPh Badan terutang sebagai variabel dependennya.

Dan faktor lain yang mempengaruhi pajak perusahaan yaitu pembiayaan deviden, salah satu modal yang didapatkan oleh perusahaan adalah dari penjualan saham perusahaan kepada para investor, dan keuntungan yang didapatkan oleh para investor yaitu berupa deviden yang diterima oleh investor setiap tahunnya

ataupun menurut ketentuan RUPS, dalam penelitian Mathilda (2012) menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap pembayaran deviden.

Melihat penjelasan ini semua, sangat erat kaitannya dengan struktur modal dan kaitannya dengan laba yang akan dikenakan pajak dan menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarkannya terhadap Negara. Hal ini yang mendasari peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Dalam hal ini, peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur adalah salah satu sektor usaha yang ada dalam suatu negara sangat perlu mengevaluasi keputusan-keputusannya guna memaksimalkan nilai sahamnya. Mengingat bahwa perusahaan sektor manufaktur yang telah mencatatkan dibursa efek, dan telah menghimpun dananya dengan menerbitkan saham, dan perusahaan manufaktur merupakan investasi jangka panjang yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian.

Hal ini yang mendasari peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya **Pengaruh Struktur Modal dan Pembayaran Deviden Terhadap Beban Pajak Penghasilan Terutang pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI pada Tahun (2010-2014).**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang ?
2. Apakah pembayaran deviden berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang ?
3. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) dan *Deviden Payout Ratio* (DPR) secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.
2. Untuk mengetahui apakah pembayaran deviden berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

3. Untuk mengetahui apakah struktur modal dan pembayaran deviden secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan terutang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana bagi penulis.
- b. Manfaat bagi peneliti untuk mengaplikasikan studi atau ilmu pengetahuan yang telah diterima selama menjalankan perkuliahan pada bidang akuntansi perpajakan di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- c. Bagi penelitian berikutnya, dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi investor, akan memberikan informasi yang bermanfaat mengenai pentingnya pengaruh struktur modal dan pembiayaan deviden terhadap pajak perusahaan sehingga dapat memberi informasi bagi para investor atau calon investor dalam mengambil keputusan investasi yang tepat.
- b. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan pendanaan dalam struktur modal dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.
- c. Bagi manajemen, diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan dalam menentukan masa depan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas laporan Skripsi ini, dilakukan dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, waktu dan tempat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang diunakan dalam skripsi ini untuk menganalisa data yang ada yang penulis dapat dari studi pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Didalam bab ini penulis menjelaskan, mengklasifikasikan, mendiskripsikan, dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama mengenai PPh Badan yang menjadi sorot utama dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, semua data yang diperoleh akan diolah menggunakan software spss 21. Kemudian hasil pengolahan data akan dipaparkan beserta penjelasan atas hasil pengolahan tersebut. Selain itu terdapat juga pembahasan yang akan lebih merinci menjelaskan hasil pengolahan yang diikuti penjelasan tambahan untuk mendukung hasil tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.